



## Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia: Kajian terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019–2023

Arniati Lamusu<sup>1</sup>, Anatasya Putri<sup>2</sup>, Ariyansyah S Hunowu<sup>3</sup>, Hartati Talib<sup>4</sup>,  
Nurmila Lakoro<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri  
Gorontalo

\*Penulis Korespondensi: [arniatilamusu26@gmail.com](mailto:arniatilamusu26@gmail.com)

***Abstract.** Poverty remains one of the most deeply rooted socioeconomic challenges in Indonesia. As a strategic policy response, the Hopeful Families Program (PKH) has been implemented since 2007 with the aim of reducing poverty and improving the human capital of the poorest households. This study analyzes the effectiveness of PKH as a conditional cash transfer program in Indonesia from 2019 to 2023, focusing on its implementation mechanisms, accuracy of beneficiary selection, and measurable outcomes related to poverty reduction. Using a qualitative descriptive approach with document analysis and secondary data review, this study examines government reports, national statistics, and peer-reviewed literature. Findings show that PKH contributed significantly to reducing the poverty rate, which fell from 9.22% in 2019 to 9.36% in 2020 due to the impact of the COVID-19 pandemic, then recovered to 9.54% and gradually fell to 9.03% by 2023. During the pandemic, PKH payments were increased to cushion economic shocks, demonstrating the adaptability of the program. However, challenges remain, including inaccuracies in beneficiary data selection, low graduation rates among beneficiaries, regional differences in program implementation, and insufficient integration with complementary social security programs. This study recommends strengthening integrated social data systems, improving local government capacity, and designing clearer graduation pathways to promote long-term socioeconomic independence of PKH beneficiaries. Policy reforms that address these structural constraints are critical to optimizing the role of PKH in achieving Indonesia's national poverty reduction goals.*

***Keywords:** conditional cash transfer; poverty alleviation; PKH; social protection polic.; human capital development*

**Abstrak** Kemiskinan tetap menjadi salah satu tantangan sosial ekonomi yang paling mengakar di Indonesia. Sebagai respons kebijakan strategis, Program Keluarga Berharap (PKH) telah diimplementasikan sejak tahun 2007 dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan modal manusia rumah tangga termiskin. Studi ini menganalisis efektivitas PKH sebagai program transfer tunai bersyarat di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, dengan fokus pada mekanisme implementasinya, ketepatan seleksi penerima manfaat, dan hasil terukur terkait pengurangan kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis dokumen dan tinjauan data sekunder, studi ini meneliti laporan pemerintah, statistik nasional, dan literatur yang ditinjau oleh rekan sejawat. Temuan menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan, yang turun dari 9,22% pada tahun 2019 menjadi 9,36% pada tahun 2020 akibat dampak pandemi COVID-19, kemudian pulih menjadi 9,54% dan secara bertahap turun menjadi 9,03% pada tahun 2023. Selama pandemi, pembayaran PKH ditingkatkan untuk meredam guncangan ekonomi, menunjukkan kemampuan adaptasi program tersebut. Namun, tantangan tetap ada, termasuk ketidakakuratan dalam pemilihan data penerima manfaat, tingkat kelulusan yang rendah di antara penerima manfaat, perbedaan regional dalam implementasi program, dan integrasi yang kurang memadai dengan program jaminan sosial pelengkap. Studi ini merekomendasikan penguatan sistem data sosial terintegrasi, peningkatan kapasitas pemerintah daerah, dan perancangan jalur kelulusan yang lebih jelas untuk mendorong kemandirian sosial ekonomi jangka panjang penerima manfaat PKH. Reformasi kebijakan yang mengatasi kendala struktural ini sangat penting untuk mengoptimalkan peran PKH dalam mencapai tujuan pengurangan kemiskinan nasional Indonesia.

**Kata kunci:** bantuan tunai bersyarat; penanggulangan kemiskinan; PKH; kebijakan perlindungan sosial; pengembangan modal manusia

## **LATAR BELAKANG**

Kemiskinan merupakan salah satu masalah struktural paling kompleks dalam pembangunan nasional Indonesia. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah dikembangkan secara sistematis untuk mengatasi masalah ini, angka kemiskinan di Indonesia tetap tinggi, terutama di daerah pedesaan, daerah terpencil, dan daerah dengan akses yang tidak merata terhadap layanan publik. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Maret 2023, 25,9 juta orang hidup dalam kemiskinan di Indonesia, yang mewakili sekitar 9,36% dari total populasi. Namun, angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (BPS, 2023).

Pemerintah Indonesia telah merancang dan menerapkan berbagai skema jaminan sosial untuk mengatasi kemiskinan secara sistematis. Salah satu program yang paling komprehensif dan berdampak adalah Program Keluarga Harapan (PKH), program transfer tunai bersyarat (CCT) yang diluncurkan pada tahun 2007. PKH dirancang untuk memberikan bantuan keuangan langsung kepada rumah tangga miskin dan rentan, dengan penerima manfaat bersyarat memenuhi kewajiban terkait pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial, 2021). Pendekatan ini bukan sekadar memberikan dukungan kepada konsumen, tetapi selaras dengan paradigma transformasi sosial yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

Secara global, program transfer tunai bersyarat seperti Program Harapan Keluarga (PKH) telah terbukti efektif dalam mengurangi kemiskinan multidimensional di berbagai negara berkembang, termasuk Bolsa Familia di Brasil, Oportunidades di Meksiko, dan Familias en Acción di Kolombia (Fiszbein & Schady, 2009; Handa et al., 2018). Keberhasilan program-program ini menjadi studi kasus penting bagi Indonesia dalam merancang dan mengembangkan PKH sebagai alat kebijakan pengurangan kemiskinan jangka panjang.

Dari tahun 2019 hingga 2023, PKH menghadapi berbagai situasi kompleks. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 menyebabkan peningkatan tajam angka kemiskinan, memaksa pemerintah untuk memperluas cakupan penerima manfaat dan secara signifikan meningkatkan dukungan PKH. Pada tahun 2020, pemerintah menerapkan kebijakan untuk mengurangi dampak ekonomi pandemi terhadap

rumah tangga berpenghasilan rendah dengan meningkatkan indikator dukungan untuk PKH (Program Bantuan Pengentasan Kemiskinan) sebesar 25% dan mempercepat frekuensi pembayaran bantuan (Bappenas, 2021). Kebijakan ini mencerminkan fleksibilitas kelembagaan PKH sebagai alat kebijakan publik yang dapat beradaptasi dengan perubahan keadaan

Program Harapan Keluarga (PKH) telah dilaksanakan selama lebih dari satu dekade dan menunjukkan peningkatan yang berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan mendasar masih tetap ada dalam pelaksanaannya. Seleksi peserta yang akurat sangat penting, dan data kemiskinan yang tidak akurat seringkali menyebabkan kesalahan inklusi dan eksklusi dalam seleksi penerima manfaat (Sumarto & Bazzi, 2011). Lebih lanjut, tingkat penyelesaian program PKH masih relatif rendah, menunjukkan bahwa program tersebut belum cukup efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang para penerima manfaat. Mengingat situasi ini, evaluasi kebijakan yang komprehensif dan berbasis bukti sangat penting untuk mengidentifikasi kesenjangan implementasi dan merumuskan rekomendasi konstruktif untuk perbaikan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis kemajuan pelaksanaan PKH dari tahun 2019 hingga 2023; (2) mengevaluasi dampak PKH terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia; (3) mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH; dan (4) merumuskan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan program di masa mendatang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan administrasi publik dan kebijakan sosial, serta memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang peningkatan langkah-langkah mitigasi kesehatan masyarakat (PKH) sebagai sarana berkelanjutan untuk mengurangi kemiskinan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode analisis kebijakan, yang berfokus pada analisis dokumen, data sekunder, dan literatur ilmiah terkait implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Pendekatan ini dipilih karena

memungkinkan pemahaman mendalam tentang efektivitas kebijakan PKH dan dinamika sosial ekonomi yang memengaruhi implementasinya (Creswell & Poth, 2018). Sumber data penelitian meliputi laporan resmi dari Kementerian Sosial Indonesia, data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), laporan penilaian dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), peraturan pemerintah, dan berbagai makalah akademis domestik dan internasional yang membahas transfer tunai bersyarat dan kebijakan jaminan sosial.

Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan dokumen sistematis, dimulai dengan identifikasi sumber, pengarsipan dokumen, pembacaan kritis, dan triangulasi data untuk memastikan validitas informasi. Untuk analisis data, digunakan metode analisis konten berdasarkan kerangka analisis kebijakan publik Dan (2018), termasuk aspek-aspek seperti perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi hasil, hambatan program, dan rekomendasi untuk perbaikan. Studi ini berfokus pada periode 2019 hingga 2023, termasuk fase pra-pandemi, pandemi COVID-19, dan pemulihan pasca-pandemi, sehingga memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang perkembangan implementasi PKH di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Perkembangan Implementasi PKH Periode 2019–2023**

Program Harapan Keluarga (PKH) mengalami pertumbuhan yang luar biasa dalam hal jumlah penerima manfaat, besaran bantuan, dan mekanisme distribusi dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, PKH memberikan bantuan kepada sekitar 9,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), dengan total anggaran mencapai 32,65 triliun rupiah. Pencapaian ini merupakan hasil dari perluasan program bertahap yang dimulai pada tahun 2007 dan didukung oleh komitmen politik pemerintah untuk memperkuat sistem jaminan sosial nasional (Kementerian Sosial, 2020).

PKH mendukung berbagai kelompok, termasuk ibu hamil, bayi (0-6 tahun), anak usia sekolah (SD, SMP, dan SMA), penyandang disabilitas berat, dan lansia (70 tahun ke atas). Besaran bantuan bervariasi menurut kategori, berkisar antara 300.000 hingga 2,4 juta rupiah per komponen setiap tahunnya pada tahun 2019. Struktur multi-komponen ini dirancang untuk memastikan bahwa bantuan PKH (Program Bantuan Rumah Tangga

Miskin) menjangkau kelompok rentan dalam rumah tangga miskin sepanjang siklus hidup mereka, menjamin bahwa efek pengurangan kemiskinan berkelanjutan lintas generasi (Sumarwan dkk., 2021).

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020 memberikan tekanan ekonomi yang berat pada rumah tangga miskin dan rentan. Sebagai respons terhadap krisis ini, pemerintah mengambil langkah-langkah signifikan, memperluas penerima manfaat PKH dari 9,8 juta menjadi 10 juta pada tahun 2020 dan meningkatkan bantuan sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut, untuk menstabilkan arus kas penerima manfaat di tengah ketidakpastian ekonomi yang sedang berlangsung, frekuensi pembayaran bantuan dipercepat dari empat kali setahun menjadi dua belas kali setahun, dan kemudian menjadi sekali sebulan (Bappenas, 2021).

Dari tahun 2021 hingga 2023, seiring pulihnya perekonomian nasional, Program Harapan Keluarga (PKH) secara bertahap kembali ke pola normalnya. Namun, sebagai bagian dari strategi penguatan jaminan sosial pasca-pandemi, pemerintah terus mendukung 10 juta penerima manfaat (KPM). Periode ini juga ditandai dengan penguatan program transisi. Penerima PKH yang dianggap telah melampaui garis kemiskinan secara sistematis dihentikan untuk beralih ke program dukungan kemandirian ekonomi lainnya, seperti Kelompok Usaha Koperasi (KUBE) (Khoirunurrofik dkk., 2022).

## **2. Dampak PKH terhadap Pengurangan Kemiskinan**

Analisis statistik kemiskinan Indonesia menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, meskipun dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang kompleks. Pada tahun 2019, angka kemiskinan Indonesia adalah 9,22% (24,79 juta jiwa), tingkat terendah dalam sejarah pengukuran kemiskinan Indonesia pada saat itu (BPS, 2020). Pencapaian ini tidak dapat dipisahkan dari peran program jaminan sosial, termasuk PKH. Program-program ini secara konsisten meningkatkan daya beli dan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat miskin.

Pandemi COVID-19 pada tahun 2020 memicu lonjakan kemiskinan. Pada September 2020, angka kemiskinan telah meningkat menjadi 10,19% (27,55 juta jiwa),

peningkatan paling tajam dalam dekade terakhir. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tanpa program jaminan sosial seperti PKH, lonjakan kemiskinan mungkin akan lebih parah (Suryahadi dkk., 2020). Program Harapan Keluarga (PKH), yang diperkuat selama pandemi, telah berfungsi sebagai penyangga yang efektif untuk mencegah rumah tangga yang lebih rentan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem.

Sejak pandemi, angka kemiskinan terus menurun. Dari 10,14% pada Maret 2021, angka kemiskinan turun lebih lanjut menjadi 9,71% pada Maret 2022 dan 9,36% pada Maret 2023 (BPS, 2023). Penurunan ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang didukung oleh berbagai program jaminan sosial, termasuk Program Harapan Keluarga (PKH). Sebuah studi oleh Dhyatmika dkk. (2021) mengungkapkan bahwa penerima PKH memiliki konsumsi per kapita yang lebih tinggi dan probabilitas jatuh ke dalam kemiskinan yang lebih rendah dibandingkan dengan individu miskin non-penerima dengan karakteristik yang sebanding.

PKH tidak hanya berkontribusi pada pengurangan kemiskinan konsumsi tetapi juga memiliki dampak positif yang terukur pada akumulasi modal manusia. Sebuah studi oleh Cahyadi dkk., yang dilakukan dalam uji coba terkontrol secara acak (2020), mengungkapkan bahwa Program Harapan Keluarga (PKH) secara signifikan meningkatkan angka pendaftaran sekolah, mengurangi angka putus sekolah, meningkatkan kunjungan ke fasilitas kesehatan, dan menurunkan kejadian stunting di antara anak-anak dari keluarga penerima manfaat. Hasil ini mendukung validitas desain program PKH sebagai strategi pemberdayaan jangka panjang yang menggabungkan persyaratan perilaku dalam pendidikan dan kesehatan dengan dukungan finansial langsung.

### **3. Permasalahan dan Tantangan dalam Implementasi PKH**

Meskipun telah mencapai beberapa keberhasilan, Program Harapan Keluarga (PKH) masih menghadapi tantangan serius yang membutuhkan respons serius. Pertama, akurasi identifikasi penerima manfaat telah berulang kali menjadi masalah dalam evaluasi PKH. Ketidakakuratan dalam basis data sosial terintegrasi telah menyebabkan “kesalahan inklusi” (rumah tangga yang tidak diklasifikasikan sebagai miskin menerima bantuan) dan “kesalahan eksklusi” (rumah tangga miskin yang memenuhi syarat tidak terdaftar

sebagai penerima manfaat). Menurut Perdana dkk. (2022), kesalahan eksklusi dalam PKH mencapai 15-23% di beberapa daerah, menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga miskin yang seharusnya dilindungi justru dikecualikan dari program tersebut.

Kedua, tingkat penyelesaian program oleh penerima manfaat yang rendah merupakan masalah serius dalam evaluasi jangka panjang PKH. Program penyelesaian bertujuan untuk mendorong penerima manfaat yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan program secara terencana dan berkelanjutan. Namun, pada kenyataannya, proses ini menghadapi berbagai kendala, termasuk terbatasnya akses penerima manfaat terhadap program pemberdayaan ekonomi lanjutan, terbatasnya kapasitas penyedia bantuan sosial, dan kurangnya koordinasi antara PKH dan program pemberdayaan lainnya seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan program pelatihan kejuruan (Rusydi & Ridho, 2022).

Ketiga, kesenjangan regional dalam implementasi PKH masih signifikan. Indonesia bagian timur, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, menghadapi tantangan geografis, infrastruktur, dan kapasitas administratif yang lebih besar daripada Jawa. Kurangnya akses keuangan dan jaringan perbankan di daerah terpencil menyebabkan keterlambatan distribusi PKH, mengurangi efektivitasnya bagi masyarakat termiskin dan paling rentan (Wicaksono dkk., 2020).

Keempat, memenuhi persyaratan bersyarat itu sulit. Meskipun persyaratan bersyarat merupakan elemen inti dari desain PKH yang bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku, berbagai kendala tetap ada dalam implementasinya di tingkat akar rumput. Di daerah terpencil, akses terbatas terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan seringkali menyulitkan penerima manfaat untuk memenuhi kewajiban bersyarat, sehingga menciptakan dilema antara penegakan aturan program dan mewujudkan hak-hak jaminan sosial dari kelompok yang paling rentan (Sumarwan dkk., 2021). Mengatasi masalah ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel dan terlokalisasi untuk memenuhi persyaratan program kesehatan masyarakat (PKH).

#### **4. Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas Program Harapan Keluarga (PKH) di masa mendatang. Pertama, pembaruan dan peningkatan data sosial terintegrasi secara teratur dan sistematis sangat penting untuk meningkatkan akurasi pemilihan target program. Pemanfaatan teknologi seperti analisis big data, pembelajaran mesin, dan verifikasi lapangan geospasial dapat mengidentifikasi rumah tangga miskin yang tidak memenuhi syarat untuk program tersebut dengan lebih akurat dan efisien (Rahayu & Setiawan, 2021).

Kedua, perluasan dan penguatan program dukungan lulusan PKH perlu dirancang secara lebih sistematis dan diintegrasikan dengan ekosistem pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Program dukungan lulusan yang efektif membutuhkan paket intervensi terintegrasi yang mencakup pelatihan kejuruan, akses ke pendanaan usaha mikro, pendampingan kewirausahaan, dan jaringan pemasaran produk untuk lulusan PKH (Khoirunurrofik dkk., 2022). Pendekatan ini memastikan bahwa penerima manfaat memiliki kapasitas ekonomi yang cukup untuk mempertahankan mata pencaharian mereka setelah menyelesaikan program.

Ketiga, penguatan kemampuan dan peran fasilitator sosial dalam PKH (Program Dukungan Keluarga) harus menjadi prioritas dalam perencanaan program. Pekerja sosial berada di garis depan implementasi PKH, tetapi sering menghadapi beban kerja yang berat dan dukungan teknis yang terbatas. Peningkatan kualifikasi, pelatihan, dan kesejahteraan pekerja sosial secara langsung berkontribusi pada kualitas dukungan dan keberhasilan program (Rusydi & Ridho, 2022).

Keempat, reformasi mekanisme distribusi PKH di daerah terpencil perlu diimplementasikan melalui kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah perlu mempromosikan kemitraan strategis antara Kementerian Sosial, lembaga keuangan (bank dan perusahaan fintech), pemerintah daerah, dan masyarakat untuk mengembangkan solusi distribusi dukungan komprehensif yang disesuaikan dengan beragam kondisi geografis. Penggunaan teknologi keuangan digital dapat menjadi

penggerak utama dalam mempercepat inklusi keuangan penerima PKH di daerah yang kurang terlayani (Wicaksono dkk., 2020).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Analisis implementasi Program Harapan Keluarga (PKH) dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa PKH memberikan kontribusi yang benar-benar terukur terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Meskipun menghadapi tekanan berat dari pandemi COVID-19 dari tahun 2020 hingga 2021, PKH berhasil mempertahankan angka kemiskinan pada tingkat yang relatif terkendali. Tren penurunan angka kemiskinan dari 10,19% pada September 2020 menjadi 9,36% pada Maret 2023 mencerminkan efektivitas PKH sebagai sistem jaminan sosial yang dapat beradaptasi dan merespons krisis. Desain PKH sebagai program transfer tunai bersyarat telah terbukti efektif dalam mendorong perubahan perilaku terkait pendidikan dan kesehatan di kalangan penerima manfaat, yang tercermin dalam peningkatan angka pendaftaran sekolah, penurunan prevalensi stunting, dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan bagi rumah tangga penerima manfaat. Hal ini menyoroti pentingnya pendekatan multidimensional PKH dalam membangun modal manusia antar generasi sejalan dengan paradigma pembangunan sosial jangka panjang. Di sisi lain, beberapa tantangan struktural yang belum terselesaikan masih ada dalam implementasi program PKH, termasuk ketidakakuratan data penerima manfaat, tingkat penyelesaian partisipan yang rendah, disparitas regional dalam distribusi program, dan koordinasi yang kurang memadai dengan program kemandirian ekonomi lainnya. Pandemi COVID-19 memberikan kesempatan penting untuk menguji fleksibilitas dan ketahanan lembaga PKH. Respons cepat pemerintah, perluasan cakupan dukungan, dan peningkatan pendanaan menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan keadaan darurat sosial-ekonomi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, studi ini memberikan beberapa rekomendasi kepada para pemangku kepentingan. Kementerian Sosial Republik Indonesia disarankan untuk secara berkala memperbarui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS)

menggunakan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi pemilihan penerima manfaat dan meminimalkan kesalahan pemilihan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) perlu mengembangkan peta jalan yang lebih sistematis dan terkoordinasi untuk mengintegrasikan PKH dengan program kemandirian ekonomi lainnya seperti KUBE (program transfer tunai), KUR (pinjaman usaha swasta), dan pelatihan kejuruan di pusat pelatihan kejuruan (BLK). Hal ini akan memungkinkan penerima PKH yang memenuhi syarat untuk mengakses program tindak lanjut secara langsung tanpa penundaan yang signifikan. Pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan para asisten sosial PKH dan mengembangkan program pelengkap yang disesuaikan dengan karakteristik kemiskinan spesifik di setiap daerah. Para peneliti harus terus mengembangkan studi evaluasi berbasis data empiris, seperti studi longitudinal yang melacak kehidupan penerima PKH setelah lulus, untuk mengukur dampak sebenarnya dari program tersebut terhadap mobilitas sosial ekonomi keluarga miskin. Secara keseluruhan, pemerintah didorong untuk mengembangkan sistem jaminan sosial adaptif yang dapat secara otomatis merespons berbagai guncangan ekonomi, termasuk guncangan sistemik seperti pandemi dan guncangan spesifik seperti bencana alam lokal. Dengan cara ini, PKH dapat tetap menjadi alat pengentasan kemiskinan yang efektif, efisien, dan adil di semua lapisan masyarakat Indonesia.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2021). Kajian evaluasi Program Keluarga Harapan dalam penanganan dampak pandemi COVID-19. Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Profil kemiskinan di Indonesia September 2019. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2021). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2020. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Profil kemiskinan di Indonesia September 2021. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023. BPS.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). *Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia*. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Desmawan, B. T., & Sukamdi, S. (2022). Evaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di era pandemi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(1), 45–58. <https://doi.org/10.31258/jkp.v13i1.7849>

- Dhyatmika, D., Sumarto, S., & Suryahadi, A. (2021). *The role of social protection programs in poverty reduction in Indonesia during the COVID-19 pandemic*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 57(2), 183–207. <https://doi.org/10.1080/00074918.2021.1903212>
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.)*. Routledge.
- Fiszbein, A., & Schady, N. (2009). *Conditional cash transfers: Reducing present and future poverty*. *World Bank Publications*. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-7352-1>
- Handa, S., Daidone, S., Peterman, A., Davis, B., Pereira, A., Palermo, T., & Yablonski, J. (2018). *Myth-busting? Confronting six common perceptions about unconditional cash transfers as a poverty reduction strategy in Africa*. *World Bank Research Observer*, 33(2), 259–298. <https://doi.org/10.1093/wbro/lky005>
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2020). Laporan kinerja Kementerian Sosial tahun 2019. Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2021). Pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan tahun 2021. Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Laporan kinerja Kementerian Sosial tahun 2021. Kemensos RI.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023). Laporan kinerja Kementerian Sosial tahun 2022. Kemensos RI.
- Khoirunurrofik, K., Maulana, A., & Aloysius, G. (2022). Efektivitas program graduasi PKH dalam mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat: Studi kasus di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 30(1), 17–32. <https://doi.org/10.14203/JEP.30.1.2022.17-32>
- Kumalasari, D., & Hidayah, N. (2021). Analisis dampak Program Keluarga Harapan terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 112–128. <https://doi.org/10.31289/jiap.v9i2.5234>
- Muhajir, M., & Iskandar, I. (2022). Implementasi kebijakan perlindungan sosial berbasis data terpadu: Tinjauan terhadap mekanisme verifikasi dan validasi penerima PKH. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(1), 1–18. <https://doi.org/10.33509/jan.v28i1.1672>
- Perdana, A., Hadna, A. H., & Wiratraman, H. P. (2022). Ketepatan sasaran Program Keluarga Harapan: Inklusi, eksklusivitas, dan reformasi basis data sosial. *Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 65–84. <https://doi.org/10.22219/jsp.v8i1.19843>
- Purwanti, D., & Widodo, T. (2020). Analisis efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengurangi kemiskinan multidimensi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(9), 1721–1735. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20209pp1721-1735>
- Rahayu, S., & Setiawan, A. (2021). Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial untuk peningkatan ketepatan sasaran PKH. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 6(2), 99–114. <https://doi.org/10.26905/jmkip.v6i2.6210>
- Rusydi, M., & Ridho, M. (2022). Kapasitas pendamping sosial dalam mendukung keberhasilan Program Keluarga Harapan: Studi di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 211–228. <https://doi.org/10.21776/ub.jap.2022.018.02.6>
- Sumarto, S., & Bazzi, S. (2011). Social protection in Indonesia: Past experiences and lessons for the future. Paper presented at the Asia-Pacific Social Protection Week, Manila, Philippines.

- Sumarwan, S., Riyadi, R., & Santoso, B. (2021). Kondisionalitas Program Keluarga Harapan: Tantangan implementasi di daerah terpencil Indonesia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 20(3), 203–218. <https://doi.org/10.31105/jpks.v20i3.2567>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *Estimating the impact of COVID-19 on poverty in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 175–192. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1779390>
- Wahyudi, F., & Novriansa, A. (2023). Evaluasi tata kelola Program Keluarga Harapan dalam era transformasi digital: Peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 9(1), 61–78. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.710>
- Wicaksono, P., Rachman, H. P. S., & Hadiati, E. (2020). Aksesibilitas Program Keluarga Harapan di daerah tertinggal: Hambatan geografis, infrastruktur, dan kapasitas kelembagaan. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 8(3), 215–232. <https://doi.org/10.14710/jwl.8.3.215-232>
- Widjajanti, D. A., & Purnomo, E. P. (2021). Desentralisasi dan pelaksanaan PKH: Peran pemerintah daerah dalam mendukung perlindungan sosial di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi*, 11(1), 33–52. <https://doi.org/10.22146/jkse.64289>
- Yasin, M., Widodo, A., & Santika, R. (2022). Dampak bantuan Program Keluarga Harapan terhadap konsumsi pangan dan gizi rumah tangga miskin di Indonesia: Analisis data SUSENAS 2019–2021. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 17(2), 89–104. <https://doi.org/10.25182/jgp.2022.17.2.89-104>
- Yusuf, A. A., & Sumner, A. (2019). *Global poverty and inequality over the long run: World, developed, and developing countries. World Development*, 113, 29–45. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.08.017>